



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN NEGERI TANGERANG KELAS IA KHUSUS

Jalan T. M. P. Taruna No. 7, Tangerang, Telp. (021) 5524157, Fax. (021) 5524158
 Website : www.pn-tangerang.go.id Email : pn.tangerang@gmail.com
 TANGERANG – 15118

RELAAS PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENYAMPAIAN DOKUMEN PENGADILAN NEGERI BERLIN
NOMOR : 9341 E F 1111/22 TW.

Pada hari ini, Rabu, tanggal: 31.01 2024, saya : RACHMATDANI DLABIT PRAKOSO, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Tangerang dan ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, guna memenuhi surat dari Mahkamah Agung R.I. Nomor : 29/PAN/ROG/HK2.4/1/2024, tertanggal 11 Januari 2024 perihal Permohonan Penyampaian Dokumen Pengadilan Negeri Berlin dengan resmi kepada ;

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA :

Sdr. SILVIO HARNOS, yang beralamat di Golden Vienna 2. C2/9 15322 Serpong, Tangerang, Indonesia, disebut sebagai TERGUGAT ;

Tentang Perkara Gugatan Pengadilan Negeri Berlin Nomor : 9341 E F 1111/22 TW Mengenai permintaan bantuan (Nota Diplomatik Kementerian Luar Negeri R.I),

Dalam Perkara Antara :

Bpk. Dr. EDMUND HAFERBECK, Dkk, _____ sebagai : _____ PARA PENGGUGAT ;
 LAWAN:
 SILVIO HARNOS, , _____ sebagai : _____ TERGUGAT ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan di alamat tersebut, disana saya bertemu dan berbicara dengan :

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relaas Pemberitahuan ini, -

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditanda tangani saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini ; -----

Demikianlah Relaas pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan; -----

Yang menerima

Jurusita Pengganti tersebut



RACHMATDANI DLABIT PRAKOSO
 NIP.198704252009041001



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Hukum & Perjanjian Internasional

Jl. Taman Pejambon No. 6 T. (6221) 344 1508
Jakarta Pusat 10110 F. (6221) 351 2002
W. kemlu.go.id

Jakarta, 15 Desember 2023

Nomor : 23681/HI/12/2023/55
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penyampaian Dokumen Pengadilan Negeri Berlin (a.n. **Silvio Harnos**)

Kepada Yth.

Panitera Mahkamah Agung RI

Jl. Medan Merdeka Utara No. 9 - 13,
Jakarta Pusat

Merujuk perihal pada pokok surat di atas, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia c.q. Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya telah menerima surat dari Kedutaan Besar Jerman perihal Permohonan Penyampaian Dokumen Pengadilan Nomor 9341 E F 1111/22 TW dari Pengadilan Negeri Berlin yang ditujukan kepada:

Silvio Harnos

Beralamat di Golden Vienna 2. C2/9. 15322 Serpong, Tangerang, Indonesia.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dengan hormat kami mohon bantuan Panitera Mahkamah Agung untuk meneruskan permohonan dimaksud kepada Pengadilan terkait untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal HPI,
Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya,


V. Hesti Dewayani

Tembusan:

1. Yth. Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri RI (sebagai laporan);
2. Yth. Panitera Muda Bidang Perdata Mahkamah Agung RI;

[Penterjemahan resmi dari Bahasa Jerman]

Pengadilan Negeri Berlin
27 O 102/22 (9341 E F 111/22 TW)

D – 10589 Berlin,
Tegeler Weg 17-21

Ketua
Kamar Bagian Sipil 27

-Stempel-
Diterima pada
08 Agu 2023
Pengacara Hukum Günther dan Rekan

Kepada
Mahkamah Agung
Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13

Jakarta Pusat – DKI Jakarta, Indonesia 10110

Dalam proses perkara

1. Bpk. Dr. Edmund Haferbeck, [REDACTED]
2. PeTa Deutschland e.V., Frieolzheimer Str. 3a, 70499 Stuttgart,

Penggugat

Kuasa Hukum: Pengacara Hukum Günther,
Mittelweg 150, 20148 Hamburg,

melawan

Silvio Harnos,
Golden Vienna 2, C2/9, 15322 Serpong Tangerang, Indonesia,

Tergugat

bersama ini saya mengirimkan pada lampiran yang berisikan dua duplikat yang telah disahkan untuk masing-masing: surat gugatan pada tanggal 28 Januari 2022 termasuk lampiran yang terkait dan surat perintah pengadilan pada tanggal 30 Maret 2022 dan juga surat keputusan pada tanggal 20 Maret 2022 disertai dengan permohonan untuk mengirimkan satu lembar daripada setiap dokumen tersebut kepada tergugat,

Bpk. Silvio Harnos,
Golden Vienna 2, C2/9, 15322 Serpong Tangerang, Indonesia,

melalui pengiriman sederhana dan mengirimkan kembali kepada saya bukti penerimaan surat dengan No. Akta 27 O 102/22.

2 Lampiran (dijilid)

-Stempel/Pengadilan Negeri Berlin 135-

-Ttd-

Thiel

Hakim Ketua pada pengadilan negeri

Keakuratan dan ketepatan terjemahan dari Bahasa Indonesia yang tertera ini diakui

Siegburg, 29 Agustus 2023

Fabine Goldmann

Penerjemah Bahasa Indonesia yang diberi wewenang oleh Presiden Pengadilan Tinggi Daerah Köln

Landgericht Berlin
27 O 102/22 (9341 E F 111/22 TW)

D - 10589 Berlin,
Tegeler Weg 17-21 01. Aug. 2023

Der Vorsitzende
der Zivilkammer 27

PA			
SE	08. AUG. 2023		ok
TA	Günther		
ST			

An das
Oberste Gericht
der Republik Indonesien
JL. Medan Merdeka Utara No. 9-13

Jakarta Pusat – DKI Jakarta, Indonesia 10110

In der Prozesssache

1. Herrn Dr. Edmund Haferbeck, [REDACTED]
2. PeTa Deutschland e.V., Frieolzheimer Straße 3a, 70499 Stuttgart,

Kläger,

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte Günther,
Mittelweg 150, 20148 Hamburg,

g e g e n

Silvio Harnos,
Golden Vienna 2, C2/9, 15322 Serpong Tangerang, Indonesien,

Beklagten,

übersende ich in der Anlage je zwei beglaubigte Abschriften der Klageschrift vom
28. Januar 2022 nebst den dazugehörigen Anlagen und der richterlichen Verfügung vom
30. März 2022 sowie des Beschlusses vom 20. März 2022 mit der Bitte, jeweils eines dieser
Schriftstücke dem Beklagten,

Herrn Silvio Harnos,
Golden Vienna 2, C2/9, 15322 Serpong Tangerang, Indonesien,

durch einfache Übergabe zuzustellen und mir das Zustellungszeugnis zu dem
Aktenzeichen 27 O 102/22 zu übersenden.

2 Anlagen (geheftet)



Thiel
Vorsitzender Richter am Landgericht

Landgericht Berlin
27 O 102/22 (9341 E F 111/22 TW)

D - 10589 Berlin,
Tegeler Weg 17-21

01. Aug. 2023

Der Vorsitzende
der Zivilkammer 27

An das
Oberste Gericht
der Republik Indonesien
JL. Medan Merdeka Utara No. 9-13

Jakarta Pusat – DKI Jakarta, Indonesia 10110

In der Prozesssache

1. Herrn Dr. Edmund Haferbeck, [REDACTED]
2. PeTa Deutschland e.V., Frieolzheimer Straße 3a, 70499 Stuttgart,

Kläger,

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte Günther,
Mittelweg 150, 20148 Hamburg,

g e g e n

Silvio Harnos,
Golden Vienna 2, C2/9, 15322 Serpong Tangerang, Indonesien,

Beklagten,

übersende ich in der Anlage je zwei beglaubigte Abschriften der Klageschrift vom
28. Januar 2022 nebst den dazugehörigen Anlagen und der richterlichen Verfügung vom
30. März 2022 sowie des Beschlusses vom 20. März 2022 mit der Bitte, jeweils eines dieser
Schriftstücke dem Beklagten,

Herrn Silvio Harnos,
Golden Vienna 2, C2/9, 15322 Serpong Tangerang, Indonesien,

durch einfache Übergabe zuzustellen und mir das Zustellungszeugnis zu dem
Aktenzeichen 27 O 102/22 zu übersenden.

2 Anlagen (geheftet)



Thiel
Vorsitzender Richter am Landgericht

[Penterjemahan resmi dari Bahasa Jerman]

Duplikat yang disahkan

Berlin, 30.03.2022



Pengadilan Negeri Berlin

27 O 102/22

Surat Perintah

Dalam proses perkara hukum
Dr. Edmund Haferbeck dan lainnya

melawan

Silvio Harnos

I. Permohonan, perintah, dan ketentuan

1. Tahapan pra-persidangan secara tertulis akan dilaksanakan.
2. Terhadap pihak tergugat ditetapkan permohonan berdasarkan § 276 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Perdata, sebagai berikut ini:
 - 2.1. Pihak tergugat bermaksud untuk menyerahkan surat perlawanan secara tertulis dalam jangka waktu

tenggat darurat selama satu bulan

sejak penerimaan surat gugatan oleh pengacara hukum.

Ketentuan:

Tenggat waktu ini tidak dapat diperpanjang dan hanya berlaku jika surat tuntutan diterima oleh pengadilan selama masa tenggat waktu tersebut berlaku. Jika surat tuntutan ini tidak diterima dalam masa tenggat berlaku, maka hal ini dapat menyebabkan kekalahan pada proses persidangan. Pengadilan dapat menjatuhkan putusan verstek atas permohonan pihak lawan (§ 331 KUHAP); dalam hal ini maka terhadap pihak yang menyebabkan putusan verstek juga dikenakan biaya pengadilan dan biaya yang dikeluarkan oleh pihak lawan (§ 91 KUHAP). Berlandaskan putusan verstek ini maka pihak lawan dari pihak yang menyebabkan putusan verstek dapat memerintahkan penyitaan sebagai jaminan (§ 708 No. 2 KUHAP). Apabila pihak tergugat menyatakan bahwa ia mengakui sebagian ataupun keseluruhan dari surat gugatan, keputusan akan dijatuhkan tanpa persidangan lisan sesuai dengan pengakuannya; pada pengakuan gugatan secara keseluruhan maka tidak berlaku pengenaan atas tiga biaya pengadilan, namun hanya satu biaya pengadilan.

- 2.2. Pihak tersebut menjawab **surat gugatan** secara tertulis dalam jangka waktu

enam minggu

setelah tenggat darurat yang disebutkan di atas, apabila ia bermaksud untuk membantah gugatan. Juga harus dijelaskan apakah terdapat landasan yang berlawanan dengan pengambilan keputusan oleh hakim tunggal.

Ketentuan berdasarkan §§ 277 Ayat 2, 296 Ayat 1 dan 3 KUHAP:

Tenggat waktu ini hanya dapat dijamin berlaku jika surat bantahan diterima sebelum masa tenggat pengadilan berakhir. Pihak tergugat hanya dapat melakukan upaya perlawanan terhadap surat gugatan selama masa tenggat berlaku, dan yaitu misalnya untuk penyerahan nota pembelaan dan keberatan, bukti-bukti dan bukti pembelaan. Jika tenggat waktu terlewati, maka segala upaya perlawanan akan dicabut dan pada proses persidangan keputusan akan diambil hanya berdasarkan presentasi fakta dari penggugat. Surat jawaban yang diterima setelah masa tenggat waktu berakhir, yakni terlambat, hanya dapat diakui jika proses perkara hukum dengan demikian tidak menjadi terlambat atau jika pihak tersebut membenarkan keterlambatan dengan cukup. Bantahan mengenai penerimaan gugatan yang terlambat dan tidak penting, hanya dapat diterima jika keterlambatan dibenarkan dengan cukup.

Kekalahan dalam proses perkara dapat terjadi hanya karena pelanggaran tenggat waktu.

Tenggat waktu yang disebutkan di atas hanya dapat diperpanjang dengan pengajuan alasan yang signifikan. Pengajuan permohonan tertulis atas perpanjangan tenggat waktu harus diserahkan ke pengadilan sebelum tenggat waktu berakhir.

- 2.3. Jika pihak tergugat bermaksud melakukan pembelaan terhadap gugatan, ia harus menunjuk **pengacara hukum** atau - menunjuk kuasa hukum dalam perjanjian dengan pengacara yang berbahasa Jerman dari satu negara anggota Uni Eropa atau negara yang termasuk dalam perjanjian lainnya yang menjadi bagian traktat perekonomian Eropa, yang memiliki kewenangan berdasarkan Bagian 1 dan 5 Hukum tentang Praktek pengacara Hukum Eropa di Jerman (EuRAG), yang secara temporer melaksanakan tugas sebagai pengacara hukum pada pengadilan ini.

Ketentuan:

Pengadilan Negeri mengharuskan keberadaan pengacara hukum. Oleh karena itu, hanya pengacara hukum atau pengacara hukum asing seperti yang disebutkan di atas, yang dapat secara efektif menyerahkan nota pembelaan (No.2.1.) dan jawaban gugatan (No. 2.2.) serta menyerahkan surat permohonan dan pernyataan lainnya. Upaya yang dilakukan sendiri oleh pihak yang bersangkutan, dianggap tidak efektif secara proses hukum. Jika pihak yang berlawanan tidak memiliki pengacara hukum atau pengacara hukum asing seperti yang disebutkan di atas, pengadilan dapat menjatuhkan putusan verstek melawan pihak tersebut (§§ 330, 331 KUHAP); dalam hal ini maka terhadap pihak yang menyebabkan putusan verstek juga dikenakan biaya pengadilan dan biaya yang dikeluarkan oleh pihak lawan (§ 91 KUHAP). Berlandaskan putusan verstek ini maka pihak lawan dari pihak yang menyebabkan putusan verstek dapat memerintahkan penyitaan sebagai jaminan (§ 708 No. 2 KUHAP).

Dr. Saar
Hakim pada Pengadilan Negeri
Sebagai wakil ketua

Untuk keabsahan salinan dokumen
Berlin, 01.04.2022

Lefild, JBesch
Petugas panitera pada kantor administrasi

Keakuratan dan ketepatan terjemahan dari Bahasa Indonesia yang tertera ini diakui
Siegburg, 18 Juli 2022 *Sabine Vollbracht*

Penerjemah Bahasa Indonesia yang diberi wewenang oleh Presiden Pengadilan Tinggi
Daerah Köln



27 O 102/22

Verfügung

In dem Rechtsstreit

Dr. Edmund Haferbeck und Andere

gegen

Silvio Harnos

I. **Aufforderungen, Anordnungen und Hinweise**

1. Es wird ein schriftliches Vorverfahren durchgeführt.
2. **An die beklagte Partei ergehen gemäß § 276 Zivilprozessordnung folgende Aufforderungen:**

- 2.1. Die beklagte Partei hat die Absicht der Verteidigung binnen einer
Notfrist von einem Monat

ab Zustellung der Klageschrift durch ihren Rechtsanwalt schriftlich anzuzeigen.

Belehrungen:

Die Frist kann nicht verlängert werden und ist nur dann gewahrt, wenn die Anzeige innerhalb der Frist bei Gericht eingeht. Geht sie nicht innerhalb der Frist ein, kann dies zu einem Verlust des Prozesses führen. Das Gericht kann auf Antrag der Gegenpartei ein Versäumnisurteil erlassen (§ 331 Zivilprozessordnung); in diesem Fall hat die säumige Partei auch die Gerichtskosten und die notwendigen Auslagen der Gegenseite zu tragen (§ 91 Zivilprozessordnung). Aus dem Versäumnisurteil kann der Gegner der säumigen Partei gegen diese die Zwangsvollstreckung betreiben (§ 708 Nummer 2 Zivilprozessordnung). Erklärt die Beklagtenpartei, dass sie den Klageanspruch ganz oder teilweise anerkenne, so wird sie ohne mündliche Verhandlung dem Anerkenntnis gemäß verurteilt werden; bei einem vollständigen Anerkenntnis würden nicht drei Gerichtsgebühren, sondern nur eine Gerichtsgebühr anfallen.

- 2.2. Sie hat auf das **Klagevorbringen** innerhalb von
sechs Wochen

nach Ablauf der oben genannten Notfrist schriftlich zu erwidern, wenn sie sich gegen die Klage verteidigen will. Dabei soll auch erklärt werden, ob einer Entscheidung der Sache durch den Einzelrichter Gründe entgegen stehen.

Belehrung gemäß §§ 277 Absatz 2, 296 Absätze 1 und 3 Zivilprozessordnung:

Die Frist ist nur dann gewahrt, wenn die Erwiderung vor Ablauf der Frist bei Gericht eingeht. Die beklagte Partei kann sich nur bis zum Ablauf dieser Frist gegen den Klageanspruch verteidigen und zum Beispiel Einreden und Einwendungen, Beweisangebote und Beweiseinreden vorbringen. Wird die Frist versäumt, ist jegliche Verteidigung abgeschnitten und in dem Prozess wird nur auf der Grundlage des klägerischen Sachvortrags entschieden werden. Die Klageerwiderung, die erst nach Ablauf der gesetzten Frist, also verspätet, eingeht, wird nur zugelassen, wenn sich dadurch der Rechtsstreit nicht verzögert oder wenn die Partei die Verspätung genügend entschuldigt. Verspätete verzichtbare Rügen, die die Zulässigkeit der Klage betreffen, können nur bei genügender Entschuldigung der Verspätung zugelassen werden.

Der Prozess kann also allein wegen einer Fristversäumnis verloren werden.

Die oben gesetzte Frist kann ausnahmsweise auf Antrag bei Vorliegen erheblicher Gründe verlängert werden. Der schriftliche Antrag auf Fristverlängerung muss vor Fristablauf bei Gericht eingehen.

- 2.3. Sie hat einen **Rechtsanwalt** oder im Einvernehmen mit einem Rechtsanwalt einen der deutschen Sprache mächtigen Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, der nach den Teilen 1 und 5 des Gesetzes über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland (EuRAG) berechtigt ist, vorübergehend die Tätigkeit eines Rechtsanwalts bei diesem Gericht auszuüben, zum Prozessbevollmächtigten zu bestellen, wenn sie sich gegen die Klage verteidigen will.

Belehrungen:

Vor den Landgerichten herrscht Anwaltszwang. Daher kann nur ein Rechtsanwalt oder ein vorstehend näher bezeichneter ausländischer Rechtsanwalt wirksam eine Verteidigungsanzeige (Ziffer 2.1.) und eine Klageerwiderung (Ziffer 2.2.) einreichen sowie Anträge stellen und weitere Erklärungen abgeben. Handlungen, die ein Beteiligter selbst vornimmt, sind prozessrechtlich unwirksam. Wird für die antragsgegnerische Beteiligte Seite kein Rechtsanwalt oder kein vorstehend näher bezeichneter ausländischer Rechtsanwalt tätig, kann gegen sie ein Versäumnisurteil ergehen (§§ 330, 331 Zivilprozessordnung); in diesem Fall hat der säumige Beteiligte auch die Gerichtskosten und die notwendigen Auslagen der Gegenseite zu tragen (§ 91 Zivilprozessordnung).

Aus dem Versäumnisurteil kann der Gegner des säumigen Beteiligten gegen diesen die Zwangsvollstreckung betreiben (§ 708 Nummer 2 Zivilprozessordnung).

Dr. Saar
Richterin am Landgericht
als stellvertretende Vorsitzende

Für die Richtigkeit der Abschrift
Berlin, 01.04.2022

Lefild, JBesch
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Dr. Saar
Hakim
pada Pengadilan Negeri

Hurek
Hakim
pada Pengadilan Negeri

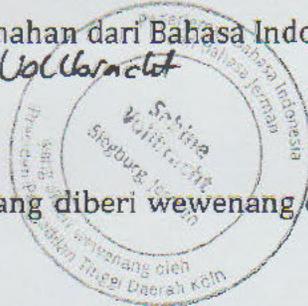
Dr. Jeremias
Hakim
pada Pengadilan Negeri

Untuk keabsahan salinan dokumen
Berlin, 01.04.2022

Lefild, JBesch
Petugas panitera pada kantor administrasi

Keakuratan dan ketepatan terjemahan dari Bahasa Indonesia yang tertera ini diakui
Siegburg, 18 Juli 2022 *fabine Ullrich*

Penerjemah Bahasa Indonesia yang diberi wewenang oleh Presiden Pengadilan Tinggi
Daerah Köln



Landgericht Berlin

Az.: 27 O 102/22



Beschluss

In dem Rechtsstreit

- 1) **Dr. Edmund Haferbeck**, [REDACTED]
- Kläger -
- 2) **PeTa Deutschland e.V.**, Frieolzheimer Straße 3, 70499 Stuttgart
- Kläger -

Prozessbevollmächtigte zu 1 und 2:

Rechtsanwälte **Günther**, Mittelweg 150, 20148 Hamburg, Gz.: 00037/22/H/st

gegen

Silvio Harnos, Golden Vienna 2, C2/9, 15322 Serpong Tangerang, Indonesien
- Beklagter -

hat das Landgericht Berlin - Zivilkammer 27 - durch die unterzeichnenden Richter am 30.03.2022 beschlossen:

Der Beklagte Silvio Harnos hat innerhalb einer Frist von einem Monat ab Zustellung dieses Beschlusses einen Zustellungsbevollmächtigten zu benennen, der im Inland wohnt oder dort einen Geschäftsraum hat, falls kein Prozessbevollmächtigter bestellt wird (§ 184 Absatz 1 Zivilprozessordnung).

Die Frist nach der bei einer späteren Zustellung durch Aufgabe zur Post die Schriftstücke als zugestellt gelten, wird auf vier Wochen festgesetzt (§ 184 Absatz 2 Satz 2 Zivilprozessordnung).

Wird entgegen dieser Anordnung kein Zustellungsbevollmächtigter benannt und auch kein Prozessbevollmächtigter bestellt, so wird darauf hingewiesen, dass spätere Zustellungen bis zur nachträglichen Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten dadurch bewirkt werden können, dass die zuzustellenden Schriftstücke unter der Anschrift der Beteiligenseite zur Post gegeben

werden. Für diesen Fall gelten die zuzustellenden Schriftstücke binnen einer Frist von vier Wochen gemäß der vorstehenden Fristsetzung (§ 184 Absatz 2 Satz 2 Zivilprozessordnung) nach ihrer Aufgabe zur Post als zugestellt.

Dr. Saar
Richterin
am Landgericht

Hurek
Richterin
am Landgericht

Dr. Jeremias
Richter
am Landgericht

Für die Richtigkeit der Abschrift
Berlin, 01.04.2022

Lefild, JBesch
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

**Pengacara Hukum Günther
Dan Rekan**

Pengacara Hukum Günther - Kotak Pos 130473 - 20104 Hamburg

Pengadilan Negeri Berlin
Tegeler Weg 17-21
10589 Berlin

Per beA

Michael Günther*
Hans-Gerd Heide!* (sampai dengan 30.06.2020)
Dr. Ulrich Wollenteit*¹
Martin Hack LL.M. (Stockholm)*¹
Clara Goldmann LL.M. (Sydney)*
Dr. Michéle John*
Dr. Dirk Legler LL.M. (Cape Town)*
Dr. Roda Verheyen LL.M. (London)*
Dr. Davina Bruhn*
André Horenburg
John Peters

¹ Pengacara bidang khusus hukum tata usaha negara

*Rekan rekanan pengacara AG Hamburg PR 582

Mittelweg 150
20148 Hamburg
No. Telp.: 040-278494-0
No.Fax.: 040-278494-99
ww.rae-guenther.de

28.01.2022
00037/22/H/st
Petugas: Sabine Stefanato
No.Ekstensi: 040-278494-16
Email: stefanato@rae-guenther.de

SURAT GUGATAN

1. Bpk. Dr. Edmund Haferbeck, [REDACTED]
2. PeTA Deutschland e.V., Friolzheimer Str. 3, 70499 Stuttgart,

-Penggugat-

Kuasa Hukum: **Pengacara Hukum Günther**, Mittelweg 150, 20148 Hamburg,

melawan

Bpk. Silvio Harnos, Golden Vienna 2, C2/9, 15322 Serpong Tangerang, Indonesia,

-Tergugat-

Dalam hal : Larangan

Nilai sengketa sementara : EUR 20.000,00

Jalur Bis 19, Halte Böttgerstrasse - Stasiun KA Jarak Jauh dan Lintas Trem Dammtor - Tempat Parkir Brodersweg
Hamburger Sparkasse Commerzbank AG GLS Bank
IBAN DE84 2005 0550 1022 2503 83 IBAN DE22 2008 0000 0400 0262 00 IBAN DE61 4306 0967 2033 2109 00
BIC HASPDEHHXXX BIC DRESDEFF200 BIC GENOMDEM1GLS

Atas nama dan atas kuasa penggugat, kami mengajukan gugatan dan memohon penentuan jadwal persidangan lisan, dimana kami akan mengajukan permintaan,

1.

untuk menetapkan perintah penahanan atau perintah penahanan sampai dengan enam bulan (sanksi denda pada kasus tertentu sebesar-besarnya € 250.000; penahanan maksimal selama dua tahun), jika terjadi upaya penghindaran pembayaran sanksi yang telah ditetapkan oleh pengadilan yakni untuk segala pelanggaran dan jika sampai dengan denda ini tidak dapat dibayarkan,

dilarang untuk

memperlihatkan, menyebarkan dan/atau mengizinkan untuk menyebarkan foto kolase berikut ini



Dr. Edmund Haferbeck nach GERATI als Stellvertreter von PETA dargestellt und mittels einer Kamera von Anwalt/Rechtsanwalt?

*Apakah kalian menginginkan perang total dengan kaum vegan?

2.

untuk menetapkan perintah penahanan atau perintah penahanan sampai dengan enam bulan (sanksi denda pada kasus tertentu sebesar-besarnya € 250.000; penahanan maksimal selama dua tahun), jika terjadi upaya penghindaran pembayaran sanksi yang telah ditetapkan oleh pengadilan yakni untuk segala pelanggaran dan jika sampai dengan denda ini tidak dapat dibayarkan,

dilarang untuk,

menyatakan pendapat dalam arti harfiah maupun secara kontekstual dan/atau menyuruh orang menyampaikan, menyebarkan dan/atau menyuruh orang untuk menyebarkan pendapat bahwa:

„Dr. Edmund Haferbeck setelah gugatan hukum terkait GERATI diturunkan pangkatnya oleh PETA“

Sebagaimana yang bisa dilihat pada artikel yang dapat diunggah pada

<https://gerati.de/2021/12/28/dr-edmund-haferbeck-nach-gerati-straftanzeige-von-peta-degradiert-und-erhaelt-anscheinen-nazi-aufgabenbereich/#comment-3429>

Apabila persyaratan hukum terpenuhi, maka dari sebelumnya kami sudah mengajukan permohonan,

untuk menjatuhkan keputusan berdasarkan pengakuan atau keputusan verstek terhadap pihak tergugat tanpa persidangan lisan dan mengabulkan pembuatan surat keputusan yang dapat berlaku secara hukum untuk penggugat.

Dasar Keputusan:

I. Yurisdiksi

Kedua belah pihak dalam hal sengketa hukum berikut telah dikenal sebelumnya oleh pengadilan melalui berbagai persidangan yang berkaitan. Sehingga meskipun kompetensi hukum pengadilan telah ditetapkan sebelumnya, namun demikian perlu untuk dijelaskan sekali lagi sebagai berikut ini:

Pihak tergugat tidak berdomisili di dalam negeri, seperti yang tertera dalam kutipan.

Pengiriman surat dapat dilakukan oleh pengadilan. Menurut § 183 Ayat 2 Hal. 1, Hal. 2 ZPO surat ini dapat dikirimkan secara langsung melalui pos, karena adanya perjanjian dengan Indonesia berdasarkan hukum internasional, yang mengatur akan hal tersebut. Hal ini dapat dilihat pada:

Lampiran K 1

yang disertakan, pada bab mengenai negara „Indonesia“. Bab ini merupakan bagian dari ketentuan tentang upaya hukum dalam perkara perdata (ZRHO), yang bersifat mengikat pengadilan (BAG NZA-RR 2014, 32 (35, Rn. 29); MüKoZPO/Häublein, Cetakan ke-5 Th. 2016, § 183 Rn. 4).

Penerjemahan resmi akan dilakukan sendiri oleh pihak penggugat setelah penerimaan dokumen-dokumen lainnya yang harus diterjemahkan.

II. Pokok Perkara

1.

Pihak penggugat 1.) bekerja sebagai ahli pertanian pada organisasi perlindungan hewan PeTA Deutschland e.V, dengan kantor utama di Stuttgart dan di Berlin dan memimpin Bagian Hukum dan Ilmiah hingga beberapa waktu sebelum ini. Beliau akan pensiun di tahun ini dikarenakan faktor usia. Oleh sebab itu, ia secara bertahap mulai mengalihkan fungsi kepemimpinan dan tanggung jawabnya saat tersebut dan pada saat ini beralih menjalankan tugas di bidang „*Special Projects*“ untuk pihak penggugat 2.).

Tujuan pihak penggugat 2.) yaitu untuk mendukung aktivitas perlindungan hewan, terutama untuk menghindari penganiayaan, penyiksaan, dan perburuan hewan maupun untuk membangun kesadaran, bahwa binatang adalah makhluk hidup tak bersalah dengan perasaan, yang harus menderita. Tujuan ini juga tercantum sebagai peraturan yang ditetapkan oleh penggugat 2.), yang kami sertakan sebagai

Lampiran K 2

pada dokumen.

Sebelumnya PeTA Deutschland e.V. salah satunya juga secara kritis mengecam produksi pembuatan kopi dengan menggunakan musang luwak, yang dikenal dengan „Kopi Luwak“. Pihak tergugat juga terlibat dalam hal ini, dimana ia melakukan perdagangan Kopi Luwak di Indonesia.

2.

Kolofon dari situs tersebut menunjukkan tergugat sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk situs web: www.gerati.de „Melawan Pelindung Hewan yang Radikal“.

Hasil cetakan dari kolofon situs tersebut kami sertakan sebagai

Lampiran K 3.

Pada situs web tersebut pihak tergugat menyebarkan beragam artikel berita maupun artikel blog. Keseluruhan situs web „gerati.de“ dirancang untuk merusak nama baik penggugat 2.) dan pihak-pihak yang bertanggung jawab kepadanya dan para pegawainya maupun reputasi para pelindung hak hewan lainnya. Dalam selang waktu yang berdekatan, tergugat menghujani penggugat 2.) dan pegawai yang bekerja untuknya dengan blog posting maupun berita blog yang isinya fitnah dan penghinaan tak berlandaskan. Daftar berita yang semacam itu tidak ada habisnya. Tergugat bertindak dengan sengaja, dan nyata sekali bahwa ia juga tidak mendapatkan pembelajaran dari keputusan pengadilan dan bahkan menghindari sanksi yang telah dijatuhkan dengan berdomisili di luar negeri.

3.

Pada alamat situs web

<https://gerati.de/2021/12/28/dr-edmund-haferbeck-nach-gerati-straftanzeige-von-peta-degradiert-und-erhaelt-anscheinen-nazi-aufgabenbereich/>

maka penggugat 1.) melalui judul „Apakah kalian menginginkan perang total dengan kaum vegan?“ pada foto kolase menjadi tercemar nama baiknya, dimana foto wajahnya ditempelkan pada foto tokoh sejarah Joseph Göbbels dan dimana ia digambarkan memiliki asosiasi dengan prinsip ideologi nasional sosialisme, yang sesungguhnya tidak benar.



Persamaan antara penggugat dengan tokoh sejarah Joseph Göbbels tidak hanya ditunjukkan melalui gambar, namun juga melalui konotasi dengan formulasi kata bahwa penggugat 1.) diberikan „tugas dalam lingkup Nazi“. Pada baris berikutnya bahkan hal ini dapat terlihat jelas melalui judul, yang membahas bahwa ia memiliki „latar belakang NAZI“.

Persamaan dengan NAZI tidak hanya dikaitkan dengan penggugat 1.) tanpa dasar dan mencemarkan nama baik penggugat 1.), namun juga berpengaruh sama terhadap penggugat 2.). Karena profilnya yang tinggi, penggugat 1.) telah diidentifikasi sebagai perwakilan penggugat 2.) selama bertahun-tahun.. Tergugat menyebutkan penggugat dalam persamaannya dengan NAZI secara figuratif, sebagai individu “yang bertindak sebagai pemimpin sepenuhnya pada PETA Jerman”. Bendera yang dikibarkan dengan logo PeTA jelas-jelas menunjukkan bahwa foto kolase yang dibuat tersebut diarahkan kepada penggugat 1.) maupun penggugat 2.). Sehingga gambar tersebut mengandung pesan yang merupakan penghinaan bahwa penggugat 2. adalah pegawai dengan orientasi politik nasional sosialisme (dengan latar belakang NAZI), dapat dipersamakan dengan Joseph Goebbels, bekerja untuk dan diberikan tugas dalam lingkup NAZI.

Penyimpulan dari tuduhan-tuduhan yang tidak benar dan penghinaan tak berlandasan ini tidak akan diterima begitu saja oleh penggugat.

4.

Pernyataan yang sama sekali tak berlandasan juga yakni bahwa penggugat 1.) diturunkan pangkatnya setelah adanya tuntutan hukum pihak tergugat melawan pihak penggugat 2.).

a) Tidak ada penurunan pangkat

Tidak ada pembicaraan tentang “penurunan pangkat”. Kata kerja penurunan pangkat (“*degradieren*”) menurut kamus Duden adalah:

„1a. pada definisi pangkat jabatan, diturunkan pangkat jabatannya; 1b. direndahkan, dipermalukan“

<https://www.duden.de/suchen/dudenonline/degradieren>

Penggugat 2. tidak pernah sama sekali „menurunkan pangkat“ penggugat 1. seperti yang dijelaskan pada definisi yang disebutkan di atas. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penggugat 1. diperkirakan akan pensiun di tahun ini. Sehubungan dengan kepentingan reorganisasi, maka penggugat memutuskan untuk memusatkan dinas bagian hukum hingga saat ini di satu tempat, yakni Berlin. Pernyataan tentang „penurunan pangkat“ jelas tidak tepat dan tidak benar.

b) Tuntutan hukum tergugat jelas tidak signifikan

Yang juga menyesatkan yaitu di dalam pernyataan sanggahan yang mengandung tuduhan-tuduhan yang tidak benar dari pihak tergugat, mengenai penurunan pangkat penggugat 1. dalam hubungannya dengan tuntutan hukum yang diajukan oleh tergugat melawan penggugat 2.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, tindakan reorganisasi dilakukan atas dasar pertimbangan pragmatis, yang mana terlihat logis sehubungan dengan pensiun pihak penggugat 1. di waktu yang akan datang, untuk memusatkan dinas bagian hukum pada kantor di Berlin. Tuntutan hukum tergugat tidak cukup signifikan untuk mempengaruhi pelaksanaan reorganisasi maupun pengalihan tugas kepada penggugat 1.) oleh penggugat 2.

Pernyataan yang dikemukakan oleh tergugat tidak berlandasan.

III. Acuan hukum

Foto kolase maupun pernyataan yang menjadi keberatan dengan ini dilarang.

Penggugat berhak melarang tindakan ini berdasarkan §§ 1004 Ayat 1; 823 Ayat 1, Ayat 2 BGB analog; §§ 185, 186 StGB.

1. Foto kolase

Foto kolase dengan judul gambar mengandung tuduhan-tuduhan yang tidak benar maupun kritik yang berisi kecaman dengan maksud menjatuhkan.

Yang juga menyesatkan yaitu pernyataan bahwa penggugat 1. menerima „tugas dalam lingkup NAZI“. Tergugat tahu persis bahwa penggugat 2. tidak memiliki tugas dalam lingkup NAZI.

Pada dasarnya tuduhan-tuduhan yang merupakan fitnah tidak mendapatkan perlindungan hukum kebebasan berbicara berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 GG (BGH NJW-RR 2000, 1209, 1210).

Jika ditemukan adanya tuduhan-tuduhan yang tidak benar, maka untuk dipertimbangkan bagaimana pernyataan dengan penggunaan bahasa umum tersebut akan dimengerti oleh rata-rata pembaca independen (OLG Stuttgart, Surat Keputusan pada tanggal 11 September 2013 - 4 U 88/13.--, juris). Pada kasus ini, foto kolase yang menggambarkan pidato tersebut merupakan ilustrasi untuk menunjukkan keterkaitan langsung dengan sejarah NAZI, yang dapat menimbulkan asumsi kepada rata-rata pembaca bahwa sesungguhnya terdapat tugas dalam lingkup NAZI pada penggugat 2.

b)

Apabila foto kolase tersebut terlihat sebagai sebuah pendapat, maka hal itu sepenuhnya adalah kritik yang berisi kecaman yang secara faktual harus dilihat secara argumentatif, karena di dalamnya tidak mengandung landasan yang kuat untuk mengasosiasikan penggugat dengan ideologi nasional sosialisme. Persamaan antara perwakilan yang terkenal dari penggugat 2. dengan seorang penjahat perang yang terburuk dalam sejarah kemanusiaan menjadi hal yang tidak dapat diperdebatkan.

Josef Göbbels memegang peranan penting sebagai pelopor Holokaus:

„Dengan menghubungkan retorika demagogik, pengumpulan massa yang terencana dan penggunaan teknik modern secara efektif untuk kepentingan propaganda, khususnya melalui media film dan radio, Joseph Goebbels berhasil melakukan indoktrinasi ideologi nasional sosialisme terhadap sebagian besar rakyat Jerman maupun menjatuhkan kaum Yahudi dan para komunis. Ia melakukan persiapan melalui propaganda anti-semitisme dan kegiatan seperti misalnya Novemberprogrome 1938, dimana ia menyebarkan ideologi tentang deportasi dan dilanjutkan dengan pembinasaaan kaum Yahudi dan kaum minoritas lainnya, sehingga ia termasuk pelopor utama pada Holokaus.“

s. https://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_Goebbels (07.01.2022) m.w.N.

Dalam sebuah foto kolase yang menunjukkan persamaan sedemikian rupa dengan seorang kriminal NAZI yang kejam, adalah penghinaan yang bisa mendapatkan hukuman (AG Freiburg (Breisgau), Surat Keputusan pada tanggal 27 April 2018 - 26 Cs 530 Js 2497/16 (2) -, juris).

Hal ini juga dapat berlaku khususnya karena apabila foto kolase seperti itu dihubungkan dengan pernyataan „latar belakang NAZI“ dan „tugas NAZI“ sehingga menyesatkan.

Sehingga vonis terhadap tergugat tanpa pertimbangan mendalam dapat dilegitimasi berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Federal Jerman, karena foto kolase tersebut menunjukkan persamaan secara simbolis dengan tema yang menggambarkan agresi pada martabat manusia, penghinaan atau pencemaran nama baik ((BVerfG, Penolakan putusan pada 19 Mei 2020 - 1 BvR 2397/19 -, juris, Rn. 17; merujuk pada BVerfG, 09.10.1991, 1 BvR 1555/88, BVerfGE 85, 1, 16; stRspr).

Foto kolase ini bukan sesuatu yang memperdebatkan tema tersebut namun jelas-jelas tujuan utamanya adalah untuk mencemarkan nama baik seseorang (BVerfG, Penolakan putusan pada 2 November 2020 - 1 BvR 2727/19 -, Rn. 13, juris; merujuk pada BVerfGE 82, 272, 283 f.; 85, 1 16>; 93, 266, 294, 303).

2. Pernyataan terkait dugaan „penurunan pangkat“

Juga dilarang pernyataan

„Dr. Edmund Haferbeck pada gugatan hukum terkait GERATI diturunkan pangkatnya oleh PETA“

Pernyataan ini merupakan tuduhan dengan pesan inti yang memiliki makna ganda. Tuduhan ini mengandung pernyataan,

- Bahwa penggugat 1. diturunkan pangkatnya oleh penggugat 2. dengan cara „direndahkan“ maupun „dipermalukan“.
- Bahwa penyebab penurunan pangkat penggugat 1. oleh penggugat 2. dengan cara merendahkan tingkat yaitu karena tuntutan hukum dari pihak tergugat. Pernyataan ini menimbulkan kesan yang salah, bahwa tergugat mengajukan gugatan hukum terhadap pihak penggugat 2. yang cukup signifikan sehingga memberikan landasan bagi penggugat 2. untuk mendisiplinkan penggugat 1. dengan mencabut fungsi dinas sebelumnya.

Kedua pernyataan tersebut murni fiktif dan cukup signifikan untuk menurunkan martabat penggugat. Penggugat 1. bekerja untuk penggugat 2. selama lebih dari 20 tahun, dimana selama 3 tahun pertama sebagai sukarelawan. Tidak ditemukan kesalahan setelah tuntutan hukum oleh pihak tergugat yang menjadi landasan bagi penggugat 2. untuk menurunkan pangkat penggugat 1.

Hal mengenai latar belakang reorganisasi di departemen penggugat 2. telah diuraikan di atas secara rinci.

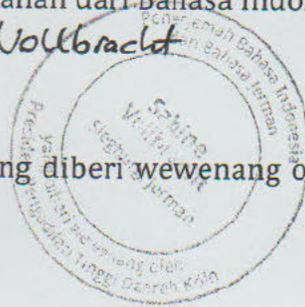
Pernyataan yang dilarang tersebut menunjukkan pencemaran nama baik (§186 StGB)
dan oleh karena itu untuk diputuskan sesuai dengan permohonan.

Ditandatangani secara elektronik tersertifikasi oleh:

Pengacara hukum
Dr. Ulrich Wollenteit

Keakuratan dan ketepatan terjemahan dari Bahasa Indonesia yang tertera ini diakui
Siegburg, 18 Juli 2022 *fabine Vollbracht*

Penerjemah Bahasa Indonesia yang diberi wewenang oleh Presiden Pengadilan Tinggi
Daerah Köln



Rechtsanwälte Günther

Partnerschaft

Rechtsanwälte Günther • Postfach 130473 • 20104 Hamburg

Landgericht Berlin
Tegeler Weg 17-21
10589 Berlin

Michael Günther *
Hans-Gerd Heide! * (bis 30.06.2020)
Dr. Ulrich Wollenteit *
Martin Hack LL.M. (Stockholm) *
Clara Goldmann LL.M. (Sydney) *
Dr. Michèle John *
Dr. Dirk Legler LL.M. (Cape Town) *
Dr. Roda Verheyen LL.M. (London) *
Dr. Davina Bruhn *
André Horenburg
John Peters

! Fachanwalt für Verwaltungsrecht
* Partner der Partnerschaft
AG Hamburg PR 582

Mittelweg 150
20148 Hamburg
Tel.: 040-278494-0
Fax: 040-278494-99
www.rae-guenther.de

28.01.2022
00037/22 /H /st
Mitarbeiterin: Sabine Stefanato
Durchwahl: 040-278494-16
Email: stefanato@rae-guenther.de

Klage

- des Herrn Dr. Edmund Haferbeck, [REDACTED]
- des PeTA Deutschland e.V., Friolzheimer Str. 3, 70499 Stuttgart,

-Kläger-

Prozessbevollmächtigte: **Rechtsanwälte Günther,**
Mittelweg 150, 20148 Hamburg,

g e g e n

Herrn Silvio Harnos, Golden Vienna 2, C2/9, 15322 Serpong Tangerang, Indo-
nesien,

-Beklagter-

w e g e n: **Unterlassung**
vorläufiger Streitwert: **EUR 20.000,00**

Buslinie 19, Haltestelle Böttgerstraße • Fern- und S-Bahnhof Dammtor • Parkhaus Brodersweg

Hamburger Sparkasse
IBAN DE84 2005 0550 1022 2503 83
BIC HASPDEHHXXX

Commerzbank AG
IBAN DE22 2008 0000 0400 0262 00
BIC DRESDEFF200

GLS Bank
IBAN DE61 4306 0967 2033 2109 00
BIC GENODEM1GLS

Namens und in Vollmacht der Kläger erheben wir Klage und bitten um Anberaumung eines Termins zur mündlichen Verhandlung, in dem wir beantragen werden,

1.

der Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, eine Ordnungshaft oder eine Ordnungshaft bis zu sechs Monaten (Ordnungsgeld im Einzelfall höchstens € 250.000; Ordnungshaft höchstens zwei Jahre), zu **u n t e r - l a s s e n**, die nachstehende Fotomontage



Dr. Edmund Haferbeck, nach GERATI-Strafanzeige von PETA degradiert und erfüllt erscheinendes HAQ-Aufgabenbereich?

in jeglicher Form zur Schau zu stellen, zu verbreiten und/oder verbreiten zu lassen;

2.

der Beklagte wird verurteilt, es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, eine Ordnungshaft oder eine Ordnungshaft bis zu sechs Monaten (Ordnungsgeld im Einzelfall höchstens € 250.000; Ordnungshaft höchstens 2 Jahre), zu **u n t e r l a s s e n** wörtlich oder sinngemäß, die Äußerungen aufzustellen und/oder aufstellen zu lassen, zu verbreiten und/oder verbreiten zu lassen,

„Dr. Edmund Haferbeck nach GERATI-Strafanzeige von PETA degradiert“

wie in dem unter

<https://gerati.de/2021/12/28/dr-edmund-haferbeck-nach-gerati-straftanzeige-von-peta-degradiert-und-erhaelt-anscheinen-nazi-aufgabenbereich/#comment-3429>

abrufbaren Artikel geschehen.

Für den Fall des Vorliegens der gesetzlichen Voraussetzungen beantragen wir zudem schon jetzt,

den Beklagten ohne mündliche Verhandlung durch Anerkenntnis- oder Versäumnisurteil zu verurteilen und den Klägern eine vollstreckbare Urteilsausfertigung zu erteilen.

Begründung:

I. Zuständigkeit

Die Parteien des vorliegenden Rechtsstreits sind dem Gericht bereits aus mehreren anhängigen Verfahren bekannt. Auch wenn damit die Zuständigkeit des Gerichts bereits früher bejaht worden ist, soll vorsorglich hierzu noch mal wie folgt ausgeführt werden:

Der Beklagte hat keinen Wohnsitz im Inland, wie sich aus dem Rubrum ergibt.

Eine Zustellung kann durch das Gericht erfolgen. Diese erfolgt gem. § 183 Abs. 2 S. 1, S. 2 ZPO unmittelbar durch die Post, da völkerrechtliche Vereinbarungen mit Indonesien vorliegen, die dies vorsehen. Dies ergibt sich aus dem als

Anlage K 1

beigefügten Länderabschnitt „Indonesien“. Dieser Länderabschnitt ist Teil der Rechtshilfeordnung für Zivilsachen (ZRHO), die für die Gerichte bindend ist (BAG NZA-RR 2014, 32 (35, Rn. 29); MüKoZPO/Häublein, 5. Aufl. 2016, § 183 Rn. 4).

Die erforderlichen amtlichen Übersetzungen werden die Kläger nach Vorliegen der weiteren zu übersetzenden Zustellungsstücke selbst anfertigen lassen.

II. Sachverhalt

1.

Der Kläger zu 1.) arbeitet als Agrarwissenschaftler bei der Tierrechtsorganisation PeTA Deutschland e.V. mit Sitz in Stuttgart und in Berlin und leitete dort bis vor kurzem die Rechts- und Wissenschaftsabteilung. Er wird noch in diesem Jahr aus Altersgründen in Rente gehen. Deshalb hat er sukzessive begonnen, seine Leitungsfunktion und seine bisherigen Aufgabenbereiche abzugeben und nimmt derzeit Funktionen in dem Aufgabenbereich „Special Projects“ bei dem Kläger zu 2. war.

Ziel des Klägers zu 2.) ist es, den Tierschutz zu fördern, insbesondere zu verhindern, dass Tiere Grausamkeiten, Misshandlungen und Verfolgung ausgesetzt sind sowie ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Tiere fühlende Lebewesen sind, die ohne eigenes Verschulden leiden müssen. Dieses Ziel ist auch in der Vereinsatzung des Klägers zu 2.), die wir als

Anlage K 2

zur Akte reichen, niedergelegt.

In der Vergangenheit hat sich PeTA Deutschland e.V. unter anderem auch kritisch mit der Produktion von Schleichkatzenkaffee, sogenanntem „Kopi Luwak“-Kaffee, auseinandergesetzt. In diese Auseinandersetzung war auch der Beklagte involviert, welcher in Indonesien mit Kopi-Luwak-Kaffee handelt.

2.

Der Beklagte ist ausweislich des Impressums verantwortlich für die Homepage: www.gerati.de „Gegen radikalen Tierschutz“.

Einen Ausdruck des Impressums überreichen wir als

Anlage K 3.

Auf der Homepage verbreitet der Beklagte diverse Artikel bzw. Blog-Einträge. Die gesamte Seite „gerati.de“ ist darauf ausgerichtet, das Ansehen des Klägers zu 2. und er für ihn tätige Verantwortlichen und MitarbeiterInnen sowie das Ansehen anderer TierrechtlerInnen zu verunglimpfen. In kurzen zeitlichen Abständen überzieht der Beklagte den Beklagten zu 2. und auch die für ihn tätigen Angestellten mit Blogbeiträgen bzw. Berichterstattungen, die fast immer haltlose üble Nachreden und Beleidigungen enthalten. Die Liste derartiger Berichte lässt sich daher beliebig fortsetzen. Der Beklagte handelt erkennbar vorsätzlich, lässt sich offenkundig auch durch gerichtliche Verurteilungen nicht belehren und entzieht sich dabei den gebotenen Sanktionen durch seinen Wohnsitz im Ausland.

3.

Unter der Anschrift

<https://gerati.de/2021/12/28/dr-edmund-haferbeck-nach-gerati-straftanzeige-von-peta-degradiert-und-erhaelt-anscheinen-nazi-aufgabenbereich/>

wird der Kläger zu 1. unter der Überschrift: „Wollt ihr den totalen veganen Krieg“ mit einer Fotomontage diffamiert, auf dem sein Kopf auf den Torso eines historischen Fotos von Joseph Göbbels montiert wurde und mit einer angeblichen nationalsozialistischen Gesinnung assoziiert wird, was selbstverständlich unzutreffend ist.



Eine Nähe des Klägers zu der historischen Figur von Josef Goebbels wird nicht nur bildlich hergestellt, sondern auch mit der Formulierung suggeriert, der Kläger zu 1. habe einen „Nazi-Aufgabenbereich“ erhalten. Wenige Zeilen später ist sogar, hervorgehoben in einer Überschrift, von einer „NAZI Vergangenheit“ die Rede.

Der Nazivergleich ist nicht nur in Bezug auf den Kläger zu 1. völlig aus der Luft gegriffen und würdigt nicht nur den Kläger zu 1. herab, sondern betrifft gleichermaßen auch den Kläger zu 2. Der Kläger zu 1. wird seit Jahren schon wegen seines hohen Bekanntheitsgrades als Repräsentant mit dem Kläger zu 2. identifiziert. Der Beklagte bezeichnet den Kläger im Sinne seines unsäglichen Nazi-Vergleichs als eine Person, die „als uneingeschränkter Führer von PETA Deutschland“ aufgetreten sei. Die wehende Fahne mit der Aufschrift PeTA bringt klar zum Ausdruck, dass die Fotomontage sowohl auf den Kläger zu 1., als auch den Kläger zu 2. abzielt. Das Bild enthält mithin auch die schmähende Botschaft, dass der Kläger zu 2. Angestellte mit nationalsozialistischer Haltung (bzw. NAZI-Vergangenheit), vergleichbar einem Josef Goebbels, beschäftigen und diesen mit einem Nazi-Aufgabenbereich ausstatten würde.

Dieses Konglomerat aus falschen Tatsachenbehauptungen und haltlosen Schmähungen möchten die Kläger nicht hinnehmen.

4.

Völlig aus der Luft gegriffen ist auch die Behauptung, der Kläger zu 1. sei nach einer Strafanzeige des Beklagten gegen den Kläger zu 2. degradiert worden.

a) Keine Degradierung

Von einer „Degradierung“ kann nicht die Rede sein. Das Verb degradieren bedeutet laut Duden:

„1a. im Dienstgrad, Dienstrang herabsetzen; 1b. herabwürdigen; erniedrigen“

<https://www.duden.de/suchen/dudenonline/degradieren>

Der Kläger zu 2. hat den Kläger zu 1. zu keiner Zeit jemals in dem vorbezeichneten Sinn „degradiert“. Wie bereits ausgeführt wurde, geht der Kläger zu 1. voraussichtlich dieses Jahr in Rente. Im Zuge des hierdurch ausgelösten Umstrukt-

rierungsbedarfs hat der Kläger zugleich beschlossen, die bisherigen Aufgaben der Rechtsabteilung an einem Ort, nämlich in Berlin zu konzentrieren. Von einer „Degradierung“ zu reden, ist völlig verfehlt und zudem ehrenrührig.

b) Strafanzeige des Beklagten völlig belanglos

Grob wahrheitswidrig ist auch die in der beanstandeten Äußerung enthaltene Tatsachenbehauptung des Beklagten, die angebliche Degradierung des Klägers zu 1. stünde in einem kausalen Zusammenhang mit einer von ihm gegen den Kläger zu 2. erstatteten Strafanzeige.

Wie bereits dargelegt wurde, liegen der Umstrukturierung pragmatische Überlegungen zugrunde, die es sinnvoll erscheinen lassen, anlässlich des bevorstehenden Ruhestands des Klägers zu 1. die Aufgaben der Rechtsabteilung im Berliner Büro zu konzentrieren. Die völlig belanglose Strafanzeige des Beklagten hatte weder Einfluss auf die organisatorische Umstrukturierung, noch auf die Übertragung eines neuen Aufgabenbereichs auf den Kläger zu 1. durch den Kläger zu 2.

Die Äußerung des Beklagten ist aus der Luft gegriffen.

III. Rechtsausführungen

Die beanstandete Fotomontage sowie die beanstandete Äußerung sind zu verbieten.

Den Klägern steht ein Unterlassungsanspruch aus §§ 1004 Abs. 1; 823 Abs. 1, Abs. 2 BGB analog, §§ 185, 186 StGB zur Seite.

1. Fotomontage

Die Fotomontage mit der Bildunterschrift ist geprägt durch falsche Tatsachenbehauptungen sowie durch bössartige Schmähkritik.

Wahrheitswidrig ist die Behauptung, dem Kläger zu 1. sei ein „NAZI-Aufgabenbereich übertragen worden. Der Beklagte weiß sehr genau, dass es keinen NAZI-Aufgabenbereich bei dem Kläger zu 2. gibt.

Unwahre Tatsachenbehauptungen genießen bereits grundsätzlich keinen Schutz durch die Meinungsfreiheit, Art. 5 Abs. 1 GG (BGH NJW-RR 2000, 1209, 1210).

Bei der Feststellung, ob eine unwahre Tatsachenbehauptung vorliegt, ist darauf abzustellen, wie sie unter Berücksichtigung des allgemeinen Sprachgebrauchs von einem unvoreingenommenen Durchschnittsleser verstanden wird (OLG Stuttgart, Urteil vom 11. September 2013 – 4 U 88/13 –, juris). Im vorliegenden Fall führt die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Fotomontage stehende Rede von der angeblichen NAZI-Vergangenheit bei dem Durchschnittsleser zu der Annahme, es gäbe tatsächlich bei dem Kläger zu 2. einen NAZI-Aufgabenbereich.

b)

Sieht man in der Fotomontage eine Meinungsäußerung, ist diese eine mit einer sachlichen Auseinandersetzung vollkommen enthobene Schmähekritik, da es keinerlei Grundlage dafür gibt, die Kläger positiv mit dem Nationalsozialismus zu assoziieren. Die Gleichsetzung eines prominenten Vertreters des Klägers zu 2. mit einem der schlimmsten Verbrecher der Menschheitsgeschichte dient in keiner Weise mehr einer Auseinandersetzung in der Sache. Josef Goebbels gilt als wesentlicher Wegbereiter des Holocaust:

„Durch die Verbindung von demagogischer Rhetorik, planvoll choreografierten Massenveranstaltungen und effektiver Nutzung moderner Technik für Propagandazwecke, insbesondere des Einsatzes von Film und Radio, gelang es Joseph Goebbels, weite Teile des deutschen Volkes für den Nationalsozialismus zu indoktrinieren sowie Juden und Kommunisten zu diffamieren. Durch antisemitische Propaganda und Aktionen wie die Novemberpogrome 1938 bereitete er ideologisch die Deportation und anschließende Vernichtung von Juden und anderen Minderheiten vor und gilt damit als einer der entscheidenden Wegbereiter des Holocausts.“

s. https://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_Goebbels (07.01.2022) m.w.N.

In einer Fotomontage mit einem derart grauenvollen Naziverbrecher gleichgesetzt werden, stellt eine strafbare Formalbeleidigung dar (AG Freiburg (Breisgau), Urteil vom 27. April 2018 – 26 Cs 530 Js 2497/16 (2) –, juris).

Das gilt insbesondere auch deshalb, wenn eine solche Fotomontage mit einer wahrheitswidrig behaupteten „NAZI Vergangenheit“ und einem „Nazi-Aufgabenbereich“ in Verbindung gebracht wird.

Eine Verurteilung des Beklagten ohne die sonst gebotene Abwägung ist hier auch nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts gerechtfertigt, weil die Fotomontage mit dem unsäglichen Vergleich einen Inhalt aufweist, der sich als

Angriff auf die Menschenwürde, Formalbeleidigung oder Schmähung darstellt (BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 19. Mai 2020 – 1 BvR 2397/19 –, juris, Rn. 17; unter Bezugnahme auf BVerfG, 09.10.1991, 1 BvR 1555/88, BVerfGE 85, 1, 16; stRspr). Die Fotomontage dient nicht mehr der Auseinandersetzung in der Sache, sondern die Diffamierung der Person steht hier eindeutig im Vordergrund (BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 02. November 2020 – 1 BvR 2727/19 –, Rn. 13, juris; beziehungsweise auf BVerfGE 82, 272, 283 f.; 85, 1 16>; 93, 266, 294, 303).

2. Aussage zur angeblichen „Degradierung“

Auch die Aussage

„Dr. Edmund Haferbeck nach GERATI-Strafanzeige von PETA degradiert“

ist zu verbieten.

Die Aussage stellt eine Tatsachenbehauptung mit einem doppelten Aussagekern dar.

Sie enthält die Aussagen,

- dass der Kläger zu 1. durch den Kläger zu 2. degradiert worden ist, also mittels einer Herabstufung „herabgewürdigt“ bzw. „erniedrigt“ worden ist und
- dass ursächlich für die pejorative Herabstufung des Klägers zu 1. durch den Kläger zu 2. eine Strafanzeige des Beklagten war. Die Aussage erweckt den falschen Eindruck, der Beklagte habe eine substantielle Anzeige gestellt, die dem Kläger zu 2. Anlass gegeben haben könnte, den Kläger zu 1. durch Enthebung von seiner bisherigen Funktion zu disziplinieren.

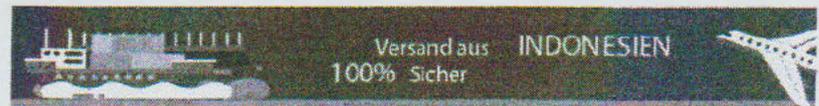
Beide Aussagen sind frei erfunden und sind in hohem Maße geeignet, die Kläger in ihrer Ehre herabzusetzen. Der Kläger zu 1. ist seit mehr als 20 Jahren bei dem Kläger zu 2. Tätig, davon die ersten 3 Jahre ehrenamtlich. Es gibt keine Fehlverhalten, dass dem Kläger zu 2. nach einer Strafanzeige durch den Beklagten Anlass zu einer Herabstufung des Klägers zu 1. gegeben hätte.

Über die Hintergründe der Umstrukturierung im Bereich des Klägers zu 2. ist bereits erschöpfend vorstehend ausgeführt worden.

Die zu verbotene Behauptung stellt eine üble Nachrede (§ 186 StGB) dar und es ist deshalb auch insoweit antragsgemäß zu entscheiden.

q.e.s. durch:

Rechtsanwalt
Dr. Ulrich Wollenteit



[STARTSEITE](#)

[STRAFTATEN](#)

[ALLGEMEIN](#)

[ZIRKUS / ZOO](#)

[POLITIK](#)



[LANDWIRTSCHAFT](#)

[TIERHOBBYS](#)

[HANDEL](#)

[SHOP / SPENDEN](#)

[KLAGEN](#)

Dr. Edmund Haferbeck nach GERATI Strafanzeige von PETA degradiert und erhält anscheinend NAZI- Aufgabenbereich?

Der ewige Leiter der PETA-Rechtsabteilung Edmund Haferbeck ist nicht mehr. Abgelöst wurde er von Krishna Singh, der seinen Rechtsanwalts-titel auch bereits abgegeben hat!

by [Silvio](#) — 28. Dezember 2021 in [Allgemein](#)

2



Dr. Edmund Haferbeck nach GERATI Strafanzeige von PETA degradiert und erhält anscheinend NAZI-Aufgabenbereich?

Start Download

Get Manual

Manuals Directory

Open

Seit Jahren wurde Dr. Edmund Haferbeck als Rechtsberater und Leiter der PETA-Rechtsabteilung geführt. Diesen Job scheint er nun los zu sein. Den Aufgabenbereich übernahm jetzt Krishna Singh, der seinen Rechtsanwaltstitel vor einigen Jahren abgegeben hatte!

Dr. Edmund Haferbeck trat als uneingeschränkter Führer von PETA Deutschland

auf. Der eigentliche Vertreter von PETA Deutschland Harald Ullmann hält sich ehern im Hintergrund bedeckt. Dafür war Haferbeck um so mehr in der Öffentlichkeit aktiv und präsentierte sich als Sprecher und Führer von PETA in der Öffentlichkeit.

In den letzten Monaten erstattete GERATI Betreiber Silvio Harnos mehrere Strafanzeigen gegen Mitarbeiter von PETA, darunter auch Edmund Haferbeck. Grund für die Strafanzeigen war die immer wieder durch PETA in Strafanzeigen auftretenden falschen Tatsachenbehauptungen gegenüber Ermittlungsbeamten. Dieses ist in Deutschland ein Straftatbestand.

Dr. Edmund Haferbeck besitzt keine juristische Ausbildung

In den Ermittlungsverfahren, unter anderen von der Staatsanwaltschaft Görlitz, ließ sich der Beschuldigte Dr. Edmund Haferbeck dahingehend ein, dass nur er allein die Strafanzeigen im Namen von PETA stellt und auch nicht von seinen ihm als Leiter der Rechtsabteilung unterstellten Juristen beraten wird. Dieses beinhaltet im eigentlichen einen Verstoß gegen die Satzung des Vereins PETA Deutschland, in der festgehalten ist, dass nur der Vorstand PETA gerichtlich und außergerichtlich vertreten darf.

Auf die Einlassung von Haferbeck in diesem Ermittlungsverfahren, teilte Silvio Harnos der ermittelnden Staatsanwaltschaft mit, dass er hier einen Verstoß gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) sieht, wo die Rechtsberatung von Nichtjuristen nur durch Juristen begleitet werden darf. Da Haferbeck dieses in seiner Aussage verneinte, sollte hier auch ein Rechtsverstoß vorliegen!

Wie Peter Höffken wurde jetzt Dr. Edmund Haferbeck nach einer Strafanzeige von PETA degradiert!

Peter Höffken betitelte sich im Namen von PETA als Diplomzoologe und Wildtierexperte. Nach einer Strafanzeige wegen des Verdachtes des Titelmisbrauches § 132a StGB degradierte PETA Herrn Höffken zum Fachreferenten. Seit dem wurde sein Diplom in Zoologie, was unter anderem Dr. Edmund Haferbeck leibhaftig gesehen haben wollte, nicht mehr angesprochen. Wie sich herausstellte, studierte Höffken an der Uni zu Köln Geologie. Wie er

durch dieses Studium ein Diplom in Zoologie erwerben konnte blieb offen.

Jetzt traf es bei PETA auch die Führungspersönlichkeit Dr. Edmund Haferbeck! Auch er wurde seines Postens enthoben, den er als Rechtsberater und Leiter der Rechtsabteilung innehatte!

Neuer Leiter der Rechtsabteilung ist Krishna Singh. Dieser hat zwar eine juristische Ausbildung genossen, hatte aber bereits vor Jahren seinen Rechtsanwaltsitel abgegeben. Es darf gespannt sein, ob jetzt endlich bei PETA juristische Professionalität Einzug hält. Persönlich glaube ich nicht daran. Allein die unter anderem von Krishna Singh initiierte Verfassungsbeschwerde im Namen der Schweine zeigt sein juristisch fehlendes Fachwissen auf! Die Beschwerde wurde vom Verfassungsgericht nicht zur Entscheidung angenommen. Anders sieht es bei meiner Beschwerde im Verfahren Dr. Edmund Haferbeck – PETA ./ Silvio Harnos – GERATI. Diese liegt derzeit zur höchstrichterlichen Entscheidung den Richtern vor. In dem Verfahren beim Bundesverfassungsgericht geht es um die Nichtzulassung der Teilnahme am eigenen Prozess nach Art 103 Grundgesetz in Verbindung mit § 128 ZPO. Wenn die Entscheidung kommt werde ich dieses natürlich hier auf GERATI veröffentlichen!

Neuer Aufgabenbereich für Edmund Haferbeck verweist auf NAZI Vergangenheit

Öffentlich wird Dr. Edmund Haferbeck als „Seniorverantwortlicher für Special Projects“ bei PETA bezeichnet. Wenn man jetzt weiß wie Haferbeck tickt und das Ullmann als PETA Vertreter sich wegen Volksverhetzung vor Gericht verantworten musste, wirft diese Berufsbezeichnung schon Fragen auf. Das Verfahren gegen Harald Ullmann als 2. Vorsitzende wegen Volksverhetzung wurde gegen Zahlung von 10.000 Euro eingestellt. PETA verglich in der Kampagne „Der Holocaust auf deinen Teller“ Juden in NAZI-KZs unter anderen mit Schweinen!

In der NAZI-Zeit waren unter anderem Spezialprojekte, die Sonderbehandlung der Juden und deren Vernichtung! Haferbeck selbst spricht sich offen für den Terror im Namen des Tierrechts aus. So drohte er in einem Interview mit der Gründung einer Terrororganisation vergleichbar der Al Quaida. Straftaten von Tierrechtlern hingegen sind ein legitimes Mittel der Tierrechtsarbeit und sollen

nach Aussagen von Haferbeck nicht verfolgt werden. Auch dieses stammt aus der NAZI Zeit. Denn auch hier wurden braune Straftaten nicht verfolgt!

Quellen:

- GERATI.de – **Peta diffamiert durch falsche Tatsachenbehauptungen Landwirt aus Niedercunnersdorf – GERATI erstattet gegen Peta und deren verantwortlichen Mitarbeiter Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Görlitz** – <https://gerati.de/2020/07/15/peta-diffamiert-durch-falsche-tatsachenbehauptungen-landwirt-aus-niedercunnersdorf-gerati-erstattet-gegen-peta-und-deren-verantwortlichen-mitarbeiter-strafanzeige-bei-der-staatsanwaltschaft/>
- GERATI.de – **Wirre Aussagen von Dr. Edmund Haferbeck (Peta) gegenüber der Staatsanwaltschaft Görlitz** – <https://gerati.de/2021/01/19/wirre-aussagen-von-dr-edmund-haferbeck-peta-gegenueber-der-staatsanwaltschaft-goerlitz/>
- [gesetz-im-internet.de](https://www.gesetze-im-internet.de/rdg/) – **Gesetz über außergerichtliche Rechtsdienstleistungen** – <https://www.gesetze-im-internet.de/rdg/>
- GERATI.de – **Wir erstatten Strafanzeige gegen Peter Höffken und PeTA** – <https://gerati.de/2014/10/01/wir-erstatten-strafanzeige-gegen-peter-hoeffken-und-peta/>
- GERATI.de – **Peter Höffken bei PeTA nur noch Fachreferent** – <https://gerati.de/2014/10/05/peter-hoeffken-bei-peta-nur-noch-fachreferent>
- GERATI.de – **Universität zu Köln bestätigt – Dr. Edmund Haferbeck lügt im Auftrag von Peta** – <https://gerati.de/2020/10/20/universitaet-zu-koeln-bestaetigt-dr-edmund-haferbeck-luegt-im-auftrag-von-peta/>
- [scharf-links.de](http://www.scharf-links.de/42.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=77469&tx_ttnews[backPid]=6&cHash=e65ba20d77) – **Gericht lehnt Ferkel-Verfassungsbeschwerde ab – PETA: „Tierschutz darf nicht nur auf dem Papier existieren!“** – [http://www.scharf-links.de/42.0.html?&tx_ttnews\[tt_news\]=77469&tx_ttnews\[backPid\]=6&cHash=e65ba20d77](http://www.scharf-links.de/42.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=77469&tx_ttnews[backPid]=6&cHash=e65ba20d77)
- [rnd.de](https://www.rnd.de/panorama/wegen-wildschweintoetung-peta-verklagt-saechsische-ministerien-W5K4MANOFZACPCGCUQAQXEZGV4.html) – **Wegen Wildschweintötung: Peta verklagt sächsische Ministerien** – <https://www.rnd.de/panorama/wegen-wildschweintoetung-peta-verklagt-saechsische-ministerien-W5K4MANOFZACPCGCUQAQXEZGV4.html>
- [finanznachrichten.de](https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2010-10/18192232-zweiter-peta-chef-muss-10-000-euro-wegen-volksverhetzung-zahlen-003.htm) – **Zweiter Peta-Chef muss 10.000 Euro wegen Volksverhetzung zahlen** – <https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2010-10/18192232-zweiter-peta-chef-muss-10-000-euro-wegen-volksverhetzung-zahlen-003.htm>

- [wikipedia.org](https://en.wikipedia.org/wiki/Sonderbehandlung) – **Sonderbehandlung** – <https://en.wikipedia.org/wiki/Sonderbehandlung>
- [neuepresse.de](https://www.neuepresse.de/Nachrichten/Politik/Deutschland-Welt/Organisation-Peta-geht-immer-militanter-gegen-missliebige-Tiernutzer-vor) – **Organisation Peta geht immer militanter gegen missliebige „Tiernutzer“ vor** – <https://www.neuepresse.de/Nachrichten/Politik/Deutschland-Welt/Organisation-Peta-geht-immer-militanter-gegen-missliebige-Tiernutzer-vor>

Wir brauchen deine Unterstützung!

Im Gegensatz zu anderen Medien haben wir bei uns keine „Paywall“ eingerichtet, denn wir möchten unsere Inhalte für alle offen halten.

Wenn jeder, der unsere Artikel über Tierrechtler und radikalen Tierschutz liest, dabei hilft, diese zu finanzieren, wird es GERATI auch weiterhin geben und wir können gemeinsam gegen Peta & Co vorgehen. Unterstütze uns und trage auch du dazu bei, die Zukunft von GERATI zu sichern.

Hier kannst du unterstützen:

Spenden per PayPal

Spenden

Überweisung:

Kt.Inh. Silvio Hamos IBAN: BE29 9670 2674 3064 BIC: TRWIBEB1XXX Bank: Wise Europa SA

Download PDF

Printable PDF (Free)

Download Here

manuaisdirectory.org

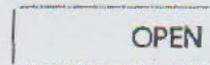


Download PDF

Printable PDF (Free)

Download Here

manuaisdirector.y.org



Tags: Dr. Edmund Haferbeck Krishna Singh PeTA

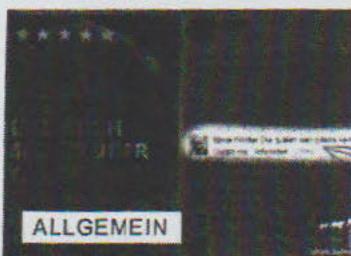
Previous Post

Great Ape Project – ist es Dummheit oder die totale Verzweiflung?

Next Post

Deutscher Tierschutzbund geht Verbot des Kükentötens zum 1. Januar nicht weit genug

Weitere interessante Artikel



Radikaler Tierrechtler Simon Fischer ruft zu Falschbewertungen auf Amazon auf

© 25. JANUAR 2022 0



PETA Zwei – wenn Demos in Deutschland zur kriminellen Erpressung ausarten

© 24. JANUAR 2022 0



ERFOLG! Buch „Robby – jetzt rede ich“ erreicht Amazon Bestseller Rank

© 20. JANUAR 2022 0

Comments 2

André  4 Wochen ago

Als ich „Seniorverantwortlicher für Special Projects“ gelesen habe, kam mir eher ein anderer Gedanke. Dr. Edmund Haferbeck wurde abkommandiert den Harald Ullmann die Inkontinenzwindeln zu wechseln und die Schnabeltasse zu reichen.

Ach, wie herrlich doppeldeutig die deutsche Sprache ist, da können die Gedanken schon auf komische Gedanken kommen.

 Antworten

Silvio  4 Wochen ago

Ja die Fach bzw. Berufsbezeichnungen sind schon von PETA sehr speziell gewählt

 Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Kommentar *

Name *

E-Mail *

Website

- Meinen Namen, meine E-Mail-Adresse und meine Website in diesem Browser speichern, bis ich wieder kommentiere.

KOMMENTAR ABSCHICKEN

Search...



Neueste Beiträge

Radikaler Tierrechtler Simon Fischer ruft zu Falschbewertungen auf Amazon auf
PETA Zwei – wenn Demos in Deutschland zur kriminellen Erpressung ausarten
Trägt PETA Schuld am EU-Entscheid? Tiertransporte in Drittländern bleiben erlaubt!
ERFOLG! Buch „Robby – jetzt rede ich“ erreicht Amazon Bestseller Rank
Great Ape Project Unterstützer offenbaren Mangel an Wissen

TransferWise

Die clevere Lösung für
Auslandsüberweisungen

Jetzt sparen

Neueste Kommentare

mha bei Radikaler Tierrechtler Simon Fischer ruft zu Falschbewertungen auf Amazon auf

Renate Alpers bei ERFOLG! Buch „Robby – jetzt rede ich“ erreicht Amazon Bestseller Rank

André bei Great Ape Project – ist es Dummheit oder die totale Verzweiflung?

Silvio bei Dr. Edmund Haferbeck nach GERATI Strafanzeige von PETA degradiert und erhält anscheinend NAZI-Aufgabenbereich?

André bei Dr. Edmund Haferbeck nach GERATI Strafanzeige von PETA degradiert und erhält anscheinend NAZI-Aufgabenbereich?

GERATI

BSD-City, Golden Vienna 2, C2/9
15322 Serpong
Indonesien

Kontakt:

Tel.: +49 (0)3581 7921521

WhatsApp: +62 87 88 2424 150

Fax: +49 (0)3581 7921529

E-Mail: info@gerati.de



Download PDF

Download Here

frompdfdoc

Open

Neueste Beiträge

Radikaler Tierrechtler Simon Fischer ruft zu Falschbewertungen auf Amazon auf

PETA Zwei – wenn Demos in Deutschland zur kriminellen Erpressung ausarten

Trägt PETA Schuld am EU-Entscheid? Tiertransporte in Drittländern bleiben erlaubt!

ERFOLG! Buch „Robby – jetzt rede ich“ erreicht Amazon Bestseller Rank

Great Ape Project Unterstützer offenbaren Mangel an Wissen

© 2014 - 2021 Über mich und GERATI / Gastautor / Werbung / Die Kaffeekasse / Impressum   
GERATI

Satzung

des Vereins PETA Deutschland e.V.

§ 1 Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr

1. Der Verein führt den Namen „PETA Deutschland e.V.“. Der Name steht für People for the Ethical Treatment of Animals (Menschen für die ethische Behandlung von Tieren). Er ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Stuttgart eingetragen.
2. Sitz des Vereins ist Stuttgart.
3. Das Geschäftsjahr beginnt am 01. August und endet am 31. Juli des folgenden Jahres.

§ 2 Zweck des Vereins

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.
2. Der Zweck des Vereins ist die Förderung des Tierschutzes.

§ 3 Zweckverwirklichung

1. Der Zweck des Vereins wird verwirklicht insbesondere durch
 - die Förderung des Rechts der Tiere, keinen Grausamkeiten, Misshandlungen oder Verfolgungen ausgesetzt zu sein,
 - die Sensibilisierung des Bewusstseins, dass Tiere fühlende Lebewesen sind, die ohne eigenes Verschulden leiden müssen,
 - die Information über unnötige Laborversuche mit Tieren und Massentierhaltung unter unwürdigen Bedingungen und die Aufklärung über Möglichkeiten zur Vermeidung solcher Laborversuche und der Massentierhaltung,
 - die ideologische Unterstützung der Entwicklung, Verbreitung und Verwendung von Produkten, die nicht von Tieren stammen oder an Tieren getestet wurden,
 - Unterstützung und Durchführung von bildenden Veranstaltungen gegen Grausamkeiten gegenüber Tieren,
 - Betreiben von Verbraucherschutz durch die Veröffentlichung oder sonstige Arten der Verteilung von Informationen einschließlich der Verbreitung von Nachrichten-Rundschreiben und
 - die Erstellung und Veröffentlichung von Bildungs- und Unterrichtsmaterial zu allen Bereichen des Tierschutzes und der Tierrechte,
2. Der Verein verwirklicht seinen Zweck auch durch die Beschaffung von Mitteln und die Weiterleitung derselben an andere in- und ausländische Körperschaften gemäß § 58 Nr. 1 AO zur Förderung des Tierschutzes; die Beschaffung von Mitteln für eine unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaft des privaten Rechts setzt voraus, dass diese selbst steuerbegünstigt ist.
3. Der Verein ist zur Verwirklichung seiner Zwecke im gesamten Bundesgebiet und im Ausland tätig.

§ 4 Selbstlosigkeit

1. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

2. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

3. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 5 Mitglieder

1. In der Bundesrepublik Deutschland fühlen sich viele Menschen den Zielen von PETA verbunden und unterstützen den Verein auf unterschiedliche Weise.

2. Der Verein hat

- a) - Fördermitglieder (vgl. § 6 Abs. 1)
- b) - Ordentliche Mitglieder (vgl. § 6 Abs. 2)

§ 6 Erwerb der Mitgliedschaft

1. Fördermitglied kann werden, wer sich zum Vereinszweck bekennt und einen regelmäßigen Beitrag leistet.

2. Ordentliches Mitglied kann jede natürliche Person werden, die sich zur Gewaltfreiheit gegenüber Tieren bekennt, und wer sich aktiv für die Ziele von PETA und ihre Verwirklichung einsetzt. Ordentliches Mitglied kann ferner jede juristische Person werden, insbesondere solche, zu deren Aufgabe die Unterstützung des Tierschutzes gehört. Ordentliche Mitglieder haben ein Stimmrecht in der Mitgliederversammlung.

3. Über Aufnahmeanträge entscheidet der Vorstand. Der Antrag soll Namen, das Alter, den Beruf und die Anschrift des Antragstellers enthalten.

4. Die Mitgliedschaft endet

- durch den Tod bei natürlichen Personen,
- durch Liquidation bei juristischen Personen,
- durch Austritt,
- durch Ausschluss.

5. Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand mit Einhaltung der Kündigungsfrist von drei Monaten zum Schluss des Geschäftsjahres zu erklären.

6. Über den Ausschluss eines Mitgliedes entscheidet der Vorstand. Er ist möglich wegen Verletzung der Mitgliedspflichten sowie groben Zuwiderhandelns gegen das Interesse und das Ansehen des Vereins. Er ist dem Ausgeschlossenen unter Angabe von Gründen schriftlich mitzuteilen. Das betroffene Mitglied erhält vor der Entscheidung Gelegenheit, sich zu äußern.

§ 7 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind

- die Mitgliederversammlung und
- der Vorstand.

§ 8 Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung ist oberstes Organ des Vereins. Sie beschließt in allen Angelegenheiten, die ihr nach dem Gesetz oder dieser Satzung ausdrücklich vorbehalten sind. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich, möglichst im ersten Quartal statt. Die

Mitglieder werden hierzu vom Vorstand unter Mitteilung der Tagesordnung und der Einhaltung einer Frist von zwei Wochen in Textform (schriftlich oder per E-Mail) an die letzte bekannte Mitgliederanschrift eingeladen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag.

2. Anträge und Beschwerden einzelner Mitglieder, über die die Mitgliederversammlung entscheiden soll, sind schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe so rechtzeitig dem Vorstand einzureichen, dass diese in der Tagesordnung für die Mitgliederversammlung bekannt gemacht werden können.
3. Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 2. Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung einen Leiter.
4. Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Der Versammlungsleiter kann Gäste zulassen. Über die Zulassung der Presse, des Rundfunks und des Fernsehens beschließt der Vorstand.
5. Für Wahlen in der Mitgliederversammlung gilt folgendes: Hat zum ersten Wahlgang kein Kandidat die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erreicht, findet eine Stichwahl zwischen den Kandidaten statt, welche die beiden höchsten Stimmenzahlen erreicht haben.
6. Über den Beschluss der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom Versammlungsleiter und Protokollführer zu unterzeichnen ist. Es soll folgende Feststellungen enthalten:
 - Ort und Zeit der Versammlung
 - Person des Versammlungsleiters und Protokollführers
 - Zahl der erschienenen Mitglieder
 - Tagesordnung
 - Abstimmungsergebnisse
 - bei Satzungsänderungen ist der genaue Wortlaut anzugeben
7. Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben:
 - a) Entgegennahme des Tätigkeitsberichts des Vorstands
 - b) Beschlussfassung über a) sowie die Entlastung des Vorstands
 - c) Festsetzung der Höhe und der Fälligkeit des Jahresbeitrags
 - d) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands
 - e) Beschlussfassung über die Änderung der Satzung
 - f) Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins
8. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung kann vom Vorstand oder einem Rechnungsprüfer jederzeit einberufen werden; sie ist darüber hinaus einzuberufen, wenn ein Viertel der Mitglieder dieses schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt.

§ 9 Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung. Mehrheitserfordernisse

Jede satzungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig. Beschlüsse werden, sofern die Satzung nichts anderes bestimmt, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. Der Beschluss gem. § 8 Abs. 7d) über die Abberufung eines Vorstandsmitglieds bedarf zwei Drittel der abgegebenen Stimmen. Die Beschlüsse gem. § 8 Abs. 7e) bedürfen einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen. Beschlüsse gem. § 8 Abs. 7f) bedürfen vier Fünftel der abgegebenen Stimmen.

§ 10 Vorstand

1. Der Vorstand des Vereins besteht aus dem 1. und dem 2. Vorsitzenden sowie dem Schriftführer. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich gem. § 26 BGB durch den 1. Vorsitzenden, den 2. Vorsitzenden und den Schriftführer vertreten; jedes Vorstandsmitglied ist einzelvertretungsberechtigt (geschäftsführender Vorstand).
2. Der geschäftsführende Vorstand führt die Geschäfte des Vereins und entscheidet über die Verwendung der Fonds und Gelder. Er gibt sich eine Geschäftsordnung und kann einen Geschäftsführer bestellen. Es können auswärtige Geschäftsstellen eingerichtet werden.

§ 11 Beschlussfassung des Vorstands

1. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen, die vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 2. Vorsitzenden, schriftlich, fernmündlich oder telegraphisch bzw. per Telefax einberufen werden. Einer Mitteilung der Tagesordnung bedarf es nicht.
2. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder, darunter der 1. oder der 2. Vorsitzende, an der Beschlussfassung teilnehmen. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des Leiters der Vorstandssitzung. Der 1. Vorsitzende, bei dessen Verhinderung der 2. Vorsitzende, leitet die Vorstandssitzung. Die Beschlüsse des Vorstands sind schriftlich niederzulegen.
3. Vorstandsbeschlüsse können auch auf fernmündlichem, schriftlichem, fernschriftlichem Weg oder per Telefax gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder die Zustimmung zum fernmündlichen oder schriftlichen Abstimmungsverfahren erteilen.

§ 12 Amtsdauer des Vorstands

1. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von fünf Jahren, vom Tag der Wahl an gerechnet, gewählt. Die Wiederwahl ist zulässig. Jedes Vorstandsmitglied bleibt bis zur Neuwahl des Vorstands im Amt.
2. Die Abwahl des Vorstands ist nur mit Zweidrittelmehrheit der in der Mitgliederversammlung abgegebenen Stimmen möglich. In derselben Sitzung ist ein neuer Vorstand zu wählen.

§ 13 Beitragsordnung

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Jahresbeitrags und dessen Fälligkeit werden vom Vorstand bestimmt.

§ 14 Jahresabschluss, Haushaltsplan

Für jedes Geschäftsjahr ist ein Jahresabschlussbericht aufzustellen. Der Vorstand erstellt jährlich im Voraus einen Wirtschaftsplan.

§ 15 Auflösung des Vereins

1. Der Verein kann nur in einer ausdrücklich zu diesem Zweck einberufenen Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von vier Fünfteln der abgegebenen Stimmen aufgelöst werden.
2. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an eine Körperschaft des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für die Förderung des Tierschutzes (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 14 AO).

§ 16 Redaktionelle Änderung der Satzung

Der Vorstand ist ermächtigt, die für die Eintragung in das Vereinsregister beim Amtsgericht notwendigen oder sonst zweckmäßig erscheinenden redaktionellen Änderungen der Satzung vorzunehmen.

[STARTSEITE](#) [STRAFTATEN](#) [ALLGEMEIN](#) [ZIRKUS / ZOO](#) [POLITIK](#)[LANDWIRTSCHAFT](#) [TIERHOBBYS](#) [HANDEL](#) [SHOP / SPENDEN](#) [KLAGEN](#) Q

Impressum

Impressum:

Silvio Harnos

BSD-City, Golden Vienna 2, C2/9

15322 Serpong Tangerang

Indonesia

Internet: www.gerati.de

Email: [info \[at\] gerati \[dot\] de](mailto:info@gerati.de)

Tel.: +49 (0)3581 7921521 (deutsche Internettelefonnummer zum Ortstarif) [Bitte Zeitunterschied von +5 h zu Deutschland einkalkulieren)

Tel.: +62 (0)87 882424150

Fax: +49 (0)3581 7921529

Haftungsausschluss

1. Inhalt des Onlineangebotes

Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.

Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu